

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

Oleh:

Zahwa Amelya Tourmaline¹

Shelsa Aurora Ferdina Hermawan²

Indah Kartika Sari³

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur (60231).

Korespondensi Penulis: zahwa.23273@mhs.unesa.ac.id,

shelsa.23349@mhs.unesa.ac.id, indah.23492@mhs.unesa.ac.id.

Abstract. The emergence of the Suramadu Bridge has driven intergovernmental collaboration to accelerate regional development. This study aims to analyze the impact of the cooperation between the Surabaya City Government and the Madura Regency in managing the area surrounding the Suramadu Bridge on local economic growth, infrastructure development, and social integration. The research employs a literature review approach based on secondary data from policy documents, official reports, and relevant academic literature. The findings indicate that the Suramadu Bridge, as a piece of strategic national infrastructure, has successfully enhanced connectivity between Surabaya and Madura, significantly influencing the local economy. Collaboration between central government institutions (BPWS and the Ministry of Public Works and Housing) and local governments has resulted in the development of supporting infrastructure (ring roads, ports, electricity, public transportation), which has stimulated investment, growth in the service and trade sectors, and a reduction in local poverty rates. Improved connectivity has also accelerated the socio-cultural integration of the two regions through broader access to education and healthcare services. However, the study also identifies challenges in ensuring equitable benefits. Coordination conflicts among

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

government entities, limited regional budgets, and social issues such as crime and cultural shifts pose obstacles. Therefore, the study recommends strengthening policy synergy, enhancing local capacity, and ensuring a more equitable distribution of development outcomes in the Suramadu area.

Keywords: *Public Policy, Intergovernmental Collaboration, Strategic Regional Development, Local Economy, Infrastructure.*

Abstrak. Munculnya Jembatan Suramadu menggerakkan kolaborasi antar pemerintah untuk memacu pembangunan kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Madura dalam pengelolaan kawasan sekitar Jembatan Suramadu terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, infrastruktur, dan integrasi sosial. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur berdasarkan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Suramadu sebagai infrastruktur strategis nasional berhasil meningkatkan konektivitas antara Surabaya dan Madura yang berdampak signifikan pada perekonomian lokal. Kolaborasi instansi pusat (BPWS dan Kementerian PUPR) dan pemerintah daerah menghasilkan pembangunan infrastruktur pendukung (jalan lingkar, pelabuhan, listrik, transportasi publik) yang mendorong investasi, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, serta penurunan angka kemiskinan lokal. Konektivitas yang lebih baik juga mempercepat integrasi sosial budaya kedua wilayah melalui akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun, penelitian juga menemukan tantangan dalam pemerataan manfaat. Konflik koordinasi antar pemerintah, keterbatasan anggaran daerah, serta isu sosial seperti kriminalitas dan pergeseran budaya menimbulkan hambatan. Oleh karena itu, rekomendasi mengarah pada peningkatan sinergi kebijakan, penguatan kapasitas lokal, dan distribusi hasil pembangunan yang lebih adil di kawasan Suramadu.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kolaborasi Antar Pemerintah, Pengembangan Wilayah Strategis, Ekonomi Lokal, Infrastruktur.

LATAR BELAKANG

Jembatan Suramadu yang diresmikan pada 10 Juni 2009 menghubungkan Bangkalan (Madura) dengan Surabaya dan sejak saat itu menjadi koridor utama bagi arus barang dan orang antarpulau. Menurut Laporan PT Jasa Marga (2019), rata-rata lalu lintas harian pada tahun 2018 mencapai 26.737 kendaraan, di mana 86% merupakan golongan I, yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap infrastruktur ini. Studi Effendi dan Hendarto (2014) mengungkapkan bahwa PDRB per kapita di Kabupaten Bangkalan tumbuh sebesar 93,63 %, Pamekasan 48,68 %, dan Sampang 42,57% setelah Jembatan Suramadu beroperasi, namun data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2024) masih mencatat tingkat kemiskinan di Bangkalan 18,66% dan Sumenep 18,70%, jauh di atas rata-rata provinsi sebesar 9,79%, sehingga menunjukkan distribusi manfaat yang belum merata di seluruh Madura.

Optimalisasi pemanfaatan Jembatan Suramadu memerlukan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, melalui Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) dan Kementerian PUPR, bertugas merancang dan mewujudkan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkar Madura, Pelabuhan Bulu Pandan, serta peningkatan pasokan listrik dan air bersih. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam paket pariwisata terpadu dan rantai pasok pangan, serta mendukung pembangunan saluran listrik 150 kV lintas pulau. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengusulkan perbaikan akses jalan rigid beton, peningkatan penerangan, dan manajemen pepohonan pada akses masuk jembatan, meski pelaksanaannya masih menghadapi kendala tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan efektivitas kolaborasi antar pemerintah dalam pengelolaan kawasan Suramadu, mengidentifikasi peran konkret Pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah kabupaten Madura dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, mengevaluasi kendala koordinasi kelembagaan beserta faktor penghambatnya, serta menilai sejauh mana Jembatan Suramadu mempengaruhi indikator ekonomi-sosial seperti arus lalu lintas, PDRB, investasi, kemiskinan, dan IPM. Sebagai landasan bagi bab hasil dan pembahasan, penelitian ini juga akan mengkaji arahan kebijakan awal meliputi penguatan koordinasi terpadu melalui penyempurnaan fungsi BPWS dan one-stop service perizinan kawasan, percepatan

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

infrastruktur pendukung, insentif investasi serta pengembangan kapasitas SDM lokal, dan skema distribusi pendapatan tol untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial di kabupaten Madura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Jembatan Suramadu, khususnya terkait analisis kebijakan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan secara sistematis. Sumber-sumber yang akan digunakan meliputi jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Jembatan Suramadu, kolaborasi antar-tingkat pemerintahan, serta teori-teori analisis kebijakan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penggalian data yang komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan, mengingat fokus penelitian adalah pada tinjauan terhadap kebijakan yang sudah ada dan implementasinya sebagaimana terekam dalam literatur.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan dianalisis meliputi dokumen-dokumen kebijakan terkait pengelolaan Jembatan Suramadu. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran mengenai evolusi kebijakan pengelolaan jembatan, peran masing-masing tingkatan pemerintahan, serta potensi adanya dinamika kolaborasi atau disinkronisasi. Keuntungan menggunakan data sekunder adalah ketersediaannya yang relatif mudah dan kemampuannya untuk memberikan perspektif historis serta cakupan informasi yang luas tanpa memerlukan interaksi langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Optimalisasi Jembatan Suramadu

1. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau Middle East Ring Road (MERR)

Optimalisasi pemanfaatan Jembatan Suramadu tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Kota Surabaya dalam mengintegrasikan jembatan tersebut ke dalam

sistem perkotaan dan strategi pembangunan wilayah. Salah satu proyek strategis yang menunjang fungsi Suramadu adalah pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau yang dikenal dengan MERR (Middle East Ring Road). Pembangunan dan pengembangan MEER secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dari berbagai penjuru Kota Surabaya menuju gerbang Jembatan Suramadu di sisi timur, yaitu melalui jalur Ir. Soekarno.

Dengan komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pembangunan infrastruktur ini, Pemerintah Kota Surabaya juga mengalokasikan anggaran yang substansial. Sebagaimana disampaikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi dalam laman resmi surabaya.go.id pada Jumat, 11 April 2025, Pemkot Surabaya menganggarkan Rp 6 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai proyek.

Infrastruktur yang menunjang mobilitas dan konektivitas. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemkot Surabaya dalam menciptakan ekosistem yang terintegrasi untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan Jembatan Suramadu.

MERR berfungsi sebagai arteri utama yang secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dari berbagai wilayah di Surabaya, terutama dari pusat kota dan wilayah selatan, menuju pintu gerbang Jembatan Suramadu di sisi timur. Sebelum adanya MERR, akses menuju jembatan seringkali terhambat oleh kemacetan di jalan-jalan kota yang sudah padat, yang secara langsung mengurangi efisiensi pergerakan logistik dan mobilitas penduduk. Dengan adanya jalan MERR, mobilisasi masyarakat menjadi cepat dan lancar.

Keberadaan jalan MERR tidak hanya sekedar membuka akses fisik menuju Jembatan Suramadu, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor jalan tersebut, khususnya di wilayah Surabaya Timur. Kawasan yang dulunya merupakan lahan kosong atau permukiman sederhana, kini berkembang pesat menjadi area komersial, perumahan modern, hingga pusat-pusat bisnis baru. Selain dampak ekonomi, MERR juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penataan ruang kota Surabaya. Peran MERR sebagai infrastruktur pendukung juga terlihat dari kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai zona fungsional kota, dari area

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

wilayah selatan hingga ke timur, yang semuanya kini memiliki akses lebih mudah ke Jembatan Suramadu.

Secara keseluruhan, pembangunan dan pengembangan MERR telah membuktikan sebagai strategi yang sangat efektif dari Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan Jembatan Suramadu. Proyek ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya dengan potensi Madura melalui sebuah jalur yang efisien dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di kedua belah pihak.

2. Transportasi Publik sebagai Penunjang Optimalisasi Jembatan Suramadu

Bentuk optimalisasi Jembatan Suramadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya adalah memberikan penunjang transportasi publik yang akan melintasi Jembatan Suramadu. Kesadaran akan urgensi mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta kebutuhan akan aksesibilitas sistem transportasi publik yang dapat melayani rute menuju dan melintasi Suramadu.

Implementasi nyata dari strategi ini adalah pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) atau program bus sejenis, seperti Trans Jatim yang rutinnya dapat diintegrasikan hingga ke Jembatan Suramadu, bahkan hingga melintasi jembatan menuju Madura. Rute-rute ini dirancang untuk memberikan alternatif transportasi yang terjangkau, nyaman, dan efisien.

Upaya Pemerintah Kota Surabaya tidak berhenti pada penyediaan armada bus, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas layanan. Pemkot terus mengkaji peningkatan frekuensi perjalanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan bus untuk menarik lebih banyak pengguna. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya yaitu, pembangunan dan penataan halte yang nyaman, integrasi sistem pembayaran yang mudah diakses bagi seluruh masyarakat, dan penyediaan informasi perjalanan yang mudah diakses, agar penumpang dapat dengan mudah dan nyaman berpindah dari satu transportasi ke transportasi lainnya.

Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan transportasi publik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, tetapi secara strategis dirancang untuk memberikan dampak langsung untuk optimalisasi Jembatan Suramadu. Dampak dari pengembangan transportasi publik sebagai penunjang optimalisasi

Jembatan Suramadu adalah peningkatan aksesibilitas yang inklusif, dimana dapat memperluas jangkauan manfaat Jembatan Suramadu ke seluruh lapisan masyarakat. Manfaat tersebut dapat dilihat dari

Peran Pemerintah Kabupaten Madura dalam Optimalisasi Jembatan Suramadu

Optimalisasi Jembatan Suramadu telah menjadi transformasi utama untuk wilayah Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pemerintah Kabupaten Madura memiliki peran penting dalam mengoptimalkan fungsi Jembatan Suramadu sebagai infrastruktur strategis yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa khususnya Surabaya, Jembatan Suramadu tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi tetapi juga sebagai penggerak percepatan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur di wilayah Madura.

Pemerintah Kabupaten di Madura memiliki tanggung jawab penting dalam mengoptimalkan Jembatan Suramadu sebagai jalur pembangunan wilayah. Keterlibatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden No. 27/2008 yang membentuk BPWS sebagai lembaga pengelola kawasan Suramadu, dengan kewajiban berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Peran strategis pemerintah kabupaten juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 1/2018 yang memuat rencana induk pengembangan wilayah Suramadu. Melalui regulasi ini, pemerintah kabupaten dituntut untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan strategi nasional guna menciptakan pembangunan yang sinergis, terencana, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Madura. Program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madura adalah :

1. Peningkatan Perekonomian Lokal

Optimalisasi Jembatan Suramadu telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor jasa dan perdagangan. Jembatan Suramadu mulai beroperasi pada tahun 2009, dan efeknya terhadap perekonomian lokal mulai terasa beberapa tahun setelahnya. Kabupaten Bangkalan, sebagai pintu gerbang utama sisi Madura, mencatat pertumbuhan sektor jasa sebesar 24,4% dalam lima tahun setelah beroperasinya jembatan (BPS Bangkalan, 2014–2019). Peningkatan konektivitas telah memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal serta didorong oleh kemudahan akses dan distribusi barang.

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

Dampaknya, persentase penduduk miskin turun dari 23,22% (2014) menjadi 15,66% (2024). Ini menegaskan bahwa peningkatan konektivitas berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.



Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bangkalan, 2003-2024

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. (2024). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bangkalan, 2003–2024. Bangkalan: BPS.*)

Pemerintah Kabupaten Madura juga mengembangkan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan memfokuskan pengembangan kawasan di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang strategis. Kawasan ini dirancang untuk menjadi area industri pengolahan, perdagangan, serta pariwisata yang terintegrasi. Pengembangan kawasan industri didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti perbaikan jalan, pengembangan pelabuhan, dan peningkatan pasokan listrik, guna menarik investasi dan mendorong aktivitas ekonomi lokal (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010; Opsi Hukum.com, 2023). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga menginisiasi pembangunan kawasan wisata halal seluas sekitar 107 hektare di lokasi yang sama. Konsep wisata halal ini menggabungkan edukasi, keuangan syariah, dan pariwisata halal yang berlandaskan nilai budaya dan agama masyarakat Madura. Pengembangan ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerah serta memanfaatkan tren global terhadap produk dan layanan halal, sehingga membuka peluang investasi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tempo.co, 2022). Dengan integrasi antara kawasan industri dan wisata halal yang didukung oleh infrastruktur kuat dan kebijakan tepat, Kabupaten Bangkalan berpotensi menjadi pusat ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di wilayah Madura dan Jawa Timur (Radar

Madura, 2023). Meskipun potensi besar, studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi Jembatan Suramadu terhadap Kabupaten Bangkalan belum optimal. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan hak milik masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar manfaat infrastruktur ini dapat dirasakan secara merata (Unair, 2025). Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pengembangan infrastruktur fisik dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola yang baik agar kawasan industri dan wisata halal dapat berkembang secara berkelanjutan dan menarik investor.

2. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memainkan peran strategis dalam mendukung optimalisasi Jembatan Suramadu melalui pengembangan infrastruktur pendukung. Upaya ini mencakup pembangunan jalan penghubung, pengembangan kawasan industri, pengembangan pelabuhan, serta peningkatan pasokan listrik sebagai fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik investasi ke wilayah Madura.

Langkah konkret yang dilakukan adalah pengalokasian anggaran sekitar Rp70 miliar untuk perbaikan jalan-jalan kabupaten, khususnya jalan penghubung antar kecamatan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, sekaligus mendukung rencana pengembangan kawasan industri yang menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah (Pemerintah Kabupaten Bangkalan, 2024). Upaya ini bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga merancang pengembangan Pelabuhan Tanjung Bumi sebagai bagian dari penguatan infrastruktur maritim. Pelabuhan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai simpul baru distribusi barang dan logistik, yang akan mendukung aktivitas perdagangan dan ekonomi lokal (Bisnis Indonesia, 2011). Sisi energi, peningkatan pasokan listrik menjadi prioritas utama guna menunjang kebutuhan industri dan rumah tangga. PT PLN (Persero) telah menyelesaikan pembangunan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Kedinding–Bangkalan sebagai bagian dari proyek interkoneksi listrik Jawa–Madura. Infrastruktur ini dirancang untuk memastikan keandalan pasokan listrik di Pulau

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

Madura, termasuk Kabupaten Bangkalan, guna menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan produktif (PLN, 2023). Melalui berbagai inisiatif tersebut, terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunjukkan komitmen kuat dalam membangun infrastruktur berkelanjutan yang sejalan dengan pengembangan kawasan sekitar Jembatan Suramadu. Langkah ini tidak hanya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal secara menyeluruh

3. Peningkatan Layanan Akses (Pendidikan, Layanan Kesehatan) dan dampaknya terhadap sosial budaya

Keberadaan Jembatan Suramadu sejak diresmikan pada tahun 2009 telah membawa dampak sosial dan budaya yang signifikan bagi masyarakat Madura, khususnya dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta perubahan sosial budaya. Jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini mempermudah akses masyarakat Madura ke Pulau Jawa, terutama Surabaya, yang merupakan pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (2020) menunjukkan peningkatan partisipasi sekolah tingkat atas di seluruh kabupaten di Madura setelah jembatan beroperasi, dengan angka partisipasi di Pamekasan naik dari 62,07% menjadi 75,13%, di Sampang dari 38,61% menjadi 64,14%, di Bangkalan dari 42,86% menjadi 53,34%, dan di Sumenep dari 90,55% menjadi 97,43%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses melalui Jembatan Suramadu telah mendorong lebih banyak pelajar Madura melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, membuka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Layanan kesehatan, kemudahan akses juga memungkinkan masyarakat Madura untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan penurunan angka kematian akibat keterbatasan fasilitas kesehatan di Madura. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan infrastruktur kesehatan di Madura yang belum merata, sehingga perlu perhatian lebih lanjut agar layanan dasar dapat terpenuhi secara optimal (Universitas Airlangga, 2025)

Dampak sosial budaya dari keberadaan jembatan ini juga cukup kompleks. Jembatan Suramadu mempercepat arus informasi dan teknologi dari Pulau Jawa ke Madura, yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidup masyarakat Madura. Integrasi yang lebih erat ini mendorong migrasi penduduk Madura ke kota-kota besar seperti Surabaya untuk mencari pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik, namun juga menimbulkan tantangan dalam pelestarian budaya lokal. Beberapa perubahan sosial yang muncul antara lain penurunan penguasaan bahasa Madura dan kurangnya minat generasi muda terhadap sastra dan tradisi Madura. Meski demikian, menurut para budayawan setempat, perubahan budaya ini merupakan bagian dari evolusi alami masyarakat yang harus diimbangi dengan upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Islami yang menjadi ciri khas masyarakat Madura (Kompasiana, 2025; Sumenepkab.go.id, 2024).

Jembatan Suramadu menjadi simbol konektivitas yang mempererat hubungan sosial budaya antara Madura dan Jawa Timur, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, berbagai permasalahan seperti maraknya kriminalitas di sekitar jembatan, termasuk pencurian dan pembegal, telah menimbulkan dampak negatif sosial yang cukup serius, seperti stigma negatif dan diskriminasi terhadap masyarakat Madura di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi agar jembatan benar-benar menjadi penghubung yang membawa manfaat sosial dan budaya secara menyeluruh (Kompasiana, 2025; Mojok.co, 2025).

Secara keseluruhan, Jembatan Suramadu telah memberikan kemudahan akses yang signifikan terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan serta mempercepat integrasi sosial budaya antara Madura dan Pulau Jawa. Namun, agar dampak positif tersebut dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Madura, mengatasi tantangan sosial budaya, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

Kolaborasi Optimalisasi Jembatan Suramadu Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Madura

Sejak diresmikan tahun 2009, Jembatan Suramadu (Surabaya–Madura) ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara Kota Surabaya dan Pulau Madura. Pemerintah pusat menegaskan bahwa perubahan operasi Suramadu menjadi jalan umum non-tol dilakukan “untuk percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura dengan mengoptimalkan keberadaan Jembatan Suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian”. Perbaikan jalan akses Jembatan Suramadu juga menjadi fokus untuk mengatasi kerusakan yang menghambat mobilitas dan distribusi barang serta jasa. Dalam kerangka inilah Pemkot Surabaya dan empat kabupaten Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) berupaya melaksanakan berbagai proyek kolaboratif sejak 2009.

Bentuk kerja sama lintas daerah antara Surabaya dan kabupaten Madura mencakup beberapa sektor strategis. Di sektor energi, Pemkot Surabaya menandatangani nota kesepahaman dengan PLN (Persero) pada 2021 untuk pengamanan pengoperasian saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) 150 kV di Jembatan Suramadu. Jalur SKTT tersebut menyalurkan listrik dari Gardu Induk Kedinding (Surabaya) ke Bangkalan guna menjamin keandalan pasokan listrik ke seluruh Pulau Madura (Bangkalan hingga Sumenep). Di bidang pariwisata, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan merencanakan kerjasama pengembangan kawasan wisata di sekitar Suramadu. Wakil rakyat Provinsi dan Wali Kota Surabaya menyatakan kedua daerah sepakat “menghidupkan kawasan Suramadu” agar sektor ekonomi, pariwisata, dan UMKM di kedua sisi jembatan tumbuh berkembang. Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) menyatakan kesiapan aktif bekerja sama dengan Bangkalan untuk mengelola atraksi wisata dan ikonik di sekitar jembatan. Proyek kolaboratif lain meliputi kerja sama logistik dan industri: pemerintah pusat (melalui BPWS dan BKPM) menawarkan pembangunan Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) sebagai area investasi berskala besar. Rencana infrastruktur mendukungnya antara lain pembangunan Pelabuhan Bulu Pandan (Kabupaten Sampang) di utara Madura dengan akses tol sepanjang 30 km menuju Surabaya, serta penambahan jaringan listrik (dari kapasitas 100 MW saat ini menuju 700 MW) untuk kawasan industri baru di Madura.

Pengembangan Suramadu diatur melalui peraturan presiden dan lembaga khusus. Perpres No.27/2008 (diubah oleh Perpres No.23/2009) membentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang berkedudukan di Surabaya. BPWS bertugas mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dasar dan menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah terkait pengembangan kawasan Surabaya–Madura. Menurut Perpres 98/2018, setelah berubah menjadi jalan umum, penyelenggaraan Suramadu dipercayakan kepada Kementerian PUPR bidang jalan. Pasal 3 Perpres 98/2018 secara eksplisit mencabut Keputusan Presiden No.79/2003 tentang pembangunan Suramadu dan ketentuan Pasal 12 Perpres 27/2008/23/2009 tentang BPWS. Dengan pembatalan ini, tanggung jawab pengelolaan infrastruktur Suramadu sepenuhnya berada di tangan kementerian teknis. Selain itu, pemerintah menetapkan Suramadu sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 (meliputi Malang, Surabaya, Bangkalan) sesuai kebijakan pengembangan berbasis kewilayahan. Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama formal (antara Pemkot Surabaya, kabupaten/kota Madura, serta BUMN seperti PLN) umumnya mengacu pada kerangka hukum tersebut. Pada 2020, lewat Perpres No.112/2020 BPWS dibubarkan, sehingga koordinasi pengembangan Suramadu kini diintegrasikan ke struktur pemerintahan yang lebih luas (Kementerian/Lembaga) dan antar pemerintah daerah.

Berbagai data menunjukkan skala arus lalu lintas, investasi, dan anggaran pembangunan kawasan Suramadu. Potensi investasi yang dipromosikan sangat besar. Misalnya, BPWS mencatat potensi nilai investasi di kawasan seluas 1.850 ha mencapai sekitar Rp130 triliun, dengan kontribusi pendanaan pemerintah senilai Rp 25 triliun (untuk infrastruktur dasar). Pemerintah melalui APBN mengalokasikan sekitar Rp5–6 triliun dalam 15 tahun untuk pembangunan infrastruktur Suramadu. Kuantitas lalu lintas juga tinggi, pada puncak arus mudik Lebaran 2024 tercatat sekitar 60 ribu kendaraan melintas Suramadu yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Untuk mendukung percepatan pembangunan, pada 2021 BPWS menyiapkan anggaran Rp88,45 miliar khusus untuk pembebasan lahan infrastruktur dan kawasan industri di Madura. Data-data ini memperlihatkan besarnya mobilisasi sumber daya (jalan, listrik, dana investasi) yang diarahkan ke kawasan Suramadu.

Dalam praktiknya, efektivitas kolaborasi Surabaya–Madura beragam. Beberapa kendala terlihat jelas. Laporan tahun 2020 mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

“mundur dari kerja sama” dengan BPWS, sehingga lembaga tersebut kini fokus pada wilayah Madura saja. Kondisi infrastruktur dasar di Madura masih tertinggal. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti jalan nasional menuju Bandara Sumenep yang “sangat sempit” dan belum sesuai standar nasional. Keterbatasan anggaran daerah di Madura juga diakui sebagai hambatan utama pembangunan lebih lanjut. Berbagai langkah perbaikan telah diupayakan, antara lain rapat koordinasi BPWS dengan keempat bupati Madura dan program *quick win* pembebasan lahan industri dengan anggaran Rp88,45 miliar. Meski demikian, pencapaian target strategis seperti mengurangi urbanisasi Madura ke Surabaya dan menghapus stigma kemiskinan Madura belum sepenuhnya terwujud. Hal ini mencerminkan bahwa integrasi RPJMD dan sinergi kebijakan antar daerah perlu ditingkatkan agar manfaat keberadaan Suramadu bagi ekonomi Madura menjadi optimal.

Kendala dalam Optimalisasi Jembatan Suramadu

1. Koordinasi dan Sinergi Antar Pemerintah Kota Surabaya dan Madura dalam Pengelolaan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu

Pengelolaan kawasan kaki Jembatan Suramadu, baik di sisi Surabaya maupun Madura, merupakan arena krusial yang menuntut koordinasi dan sinergi yang tinggi antar pemerintah daerah. Jembatan ini sebagai penghubung, menciptakan bentuk wilayah bersama yang secara administratif terpisah, namun secara fungsional erat. Tanpa adanya kerangka kerja sama yang jelas dan efektif, potensi optimalisasi Suramadu akan terhambat oleh perbedaan kebijakan, prioritas pembangunan, dan bahannya konflik kepentingan.

Bentuk koordinasi paling fundamental adalah melalui perencanaan tata ruang bersama atau yang terkoordinasi. Kawasan di sekitar kaki jembatan, terutama di Bangkalan, mengalami perubahan fungsi lahan yang cepat, dari lahan pertanian menjadi kawasan komersial, industri, atau permukiman. Koordinasi juga meluas pada pengelolaan dampak sosial dan lingkungan di kawasan kaki jembatan. Peningkatan aktivitas ekonomi dan populasi akibat Suramadu menimbulkan tantangan seperti urbanisasi yang tidak terkontrol, peningkatan limbah, dan perubahan bentuk pekerjaan masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat paling mendasar adalah pemanfaatan Jembatan Suramadu oleh masyarakat sebagai jalur mobilisasi sehari-hari. Pemilihan jembatan sebagai jalur utama dibandingkan jalur laut tradisional menunjukkan adanya kepercayaan dan adaptasi masyarakat terhadap infrastruktur ini. Fenomena tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif yang secara langsung mendukung efektivitas Jembatan Suramadu sebagai poros penghubung.

Lebih dari sekedar penggunaan, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam adaptasi ekonomi. Fenomena ini terlihat di kawasan kaki Jembatan Suramadu, dimana masyarakat lokal mulai membuka usaha baru. Fenomena ini tentunya menunjukkan jika masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, namun pelaku ekonomi.

Fenomena di atas menunjukkan partisipasi masyarakat yang tidak hanya menggunakan Jembatan Suramadu sebagai infrastruktur penghubung, namun mereka juga menjadi pelaku aktif seperti menggunakan kaki Jembatan Suramadu sebagai tempat mereka melakukan perputaran ekonomi, namun tentunya hal tersebut berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan tata ruang di kaki Jembatan Suramadu.

3. Kesenjangan Infrastruktur Penunjang di Madura

Meskipun jembatan telah berdiri megah dan memfasilitasi konektivitas antar pulau, kondisi jaringan jalan di dalam Madura, terutama jalan provinsi, masih jauh tertinggal dibandingkan dengan infrastruktur di Surabaya. Pada tahun 2010, dari 312, 29 KM jalan provinsi di wilayah Madura, yang dalam kondisi baik hanya 4,89 KM. Kondisi jalan yang kurang memadai ini tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kemudahan akses dalam mendapatkan pendidikan, kemudahan akses dalam mendapatkan kebutuhan dasar, dan kemudahan akses dalam perekonomian.

Kesenjangan infrastruktur ini tidak hanya terbatas pada jalan, tetapi juga mencakup fasilitas dasar lainnya seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Banyak wilayah di Madura masih menghadapi tantangan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan dasar tersebut, yang secara langsung membatasi potensi pengembangan industri, pariwisata, dan sektor pertanian modern. Akses dari zona pengolahan ke zona produksi garam di Pamekasan masih berupa jalan makadam dan belum diaspal, mengindikasikan bahwa infrastruktur penunjang untuk sektor ekonomi

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

penting masih belum optimal (Neliti, Pengembang Kawasan Pegaraman). Ketiadaan jaminan pasokan listrik yang memadai atau akses internet yang cepat membuat investor enggan menanamkan modal di Madura, sehingga menghambat pemerataan pembangunan dan distribusi manfaat Suramadu secara menyeluruh ke seluruh Madura.

Penyelesaian kesenjangan infrastruktur di Madura menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai optimalisasi penuh Jembatan Suramadu. Tanpa perbaikan signifikan pada jaringan jalan internal, peningkatan akses dan kualitas utilitas dasar (listrik, air bersih, telekomunikasi yang datanya dapat dilihat pada dokumen Studi Kelayakan SIMPELMAS), serta pengembangan sarana prasarana penunjang lainnya, Jembatan Suramadu hanya akan berfungsi sebagai gerbang tanpa koridor yang memadai di belakangnya. Diperlukan investasi besar dan terkoordinasi dari pemerintah pusat maupun daerah di Madura, seperti yang didukung oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dalam percepatan pengembangan infrastruktur di Madura (bpiw.pu.go.id, 2021), untuk secara bertahap menutup kesenjangan ini agar potensi ekonomi dan sosial Madura dapat terangkat secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Suramadu merupakan infrastruktur strategis nasional yang berhasil membuka akses konektivitas antara Surabaya dan Madura, sekaligus menjadi pendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di kedua wilayah. Optimalisasi jembatan ini tercermin dari peran aktif dua pihak utama, yakni Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan fungsi jembatan melalui pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (MERR) yang menghubungkan langsung ke akses jembatan, penyediaan transportasi publik seperti Trans Jatim, serta pengembangan kawasan wisata dan logistik di sekitar kaki jembatan. Hal ini menunjukkan komitmen Surabaya dalam menjadikan kawasan Suramadu sebagai simpul pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan wilayah kota.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memanfaatkan keberadaan jembatan sebagai jalur strategis pembangunan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor jasa dan perdagangan, yang tercatat meningkat hingga 24,4% pasca-operasional jembatan. Dampak ekonomi ini turut menurunkan angka kemiskinan dan didukung oleh pengembangan kawasan industri, pelabuhan, pariwisata halal, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik. Dari sisi sosial, peningkatan partisipasi pendidikan dan akses layanan kesehatan ke Surabaya menandai keberhasilan integrasi wilayah yang lebih luas.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa manfaat optimalisasi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Madura. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala seperti ketimpangan infrastruktur, lemahnya koordinasi antar pemerintah, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kendala-kendala ini menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan distribusi manfaat jangka panjang dari Jembatan Suramadu. Oleh karena itu, optimalisasi Jembatan Suramadu tetap memerlukan penguatan kolaborasi lintas wilayah, sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta keberlanjutan program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan Madura dan Surabaya.

Saran

Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam pembangunan. Program pelatihan kerja, penguatan UMKM, dan pendidikan vokasi perlu diperluas secara merata dan untuk mengoptimalkan manfaat Jembatan Suramadu secara berkelanjutan, diperlukan penguatan koordinasi lintas wilayah antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Madura, khususnya dalam perencanaan tata ruang, infrastruktur pendukung, dan pengembangan kawasan ekonomi.

Pemerintah daerah Madura juga perlu memperluas pembangunan infrastruktur dasar ke wilayah pedalaman agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di sekitar kaki jembatan. Terkait kelembagaan, jika terbukti efektif, keberadaan BPWS atau lembaga sejenis sebaiknya dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Kehadiran lembaga khusus ini penting agar pengelolaan dan pengembangan kawasan Suramadu lebih terfokus, terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

Selain itu, perlu dilakukan audit sosial secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Aspek seperti partisipasi warga, ketimpangan sosial, dan akses terhadap layanan dasar harus menjadi indikator utama dalam evaluasi lanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antaranews. (2024, 18 Mei). DPRD Jatim Harap Layanan Trans Batam Jangkau Seluruh Pulau Madura. <https://www.antaranews.com/berita/4688245/dprd-jatim-harap-layanan-transjatim-jangkau-seluruh-pulau-madura>
- Antaranews. (2018, 26 Oktober). Menimbang Kemajuan Madura dari Toll Gratis Suramadu. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/762601/menimbang-kemajuan-madura-dari-toll-gratis-suramadu>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura*. Retrieved from [https://peraturan.go.id/:contentReference\[oaicite:25\]{index=25}:contentReference\[oaicite:26\]{index=26}](https://peraturan.go.id/:contentReference[oaicite:25]{index=25}:contentReference[oaicite:26]{index=26})
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. (2024, 25 Juli). Profil Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Maret 2024. Diakses dari <https://bangkalankab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/25/34/profil-kemiskinan-di-kabupaten-bangkalan-maret-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024, Maret). *Statistik kemiskinan Provinsi Jawa Timur Maret 2024*. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/publication/2024/03/15/statis-kemiskinan-provinsi-jawa-timur-maret-2024.html>
- BPIW PUPR. (n.d.). BPIW Dukung Percepatan Pengembangan Wilayah Madura dan Kepulauan Sekitarnya. Diakses dari <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/bpiw-dukung-percepatan-pengembangan-wilayah-madura-dan-kepulauan-sekitarnya>

- Detik Travel. (2025, Maret 11). *Jembatan Suramadu Mau Ditarif Lagi?*. Retrieved from [https://travel.detik.com/travel-news/d-7817382/jem_batan-suramadu-mau-ditarif-lagi:contentReference\[oaicite:33\]{index=33}](https://travel.detik.com/travel-news/d-7817382/jem_batan-suramadu-mau-ditarif-lagi:contentReference[oaicite:33]{index=33})
- Effendi, E., & Hendarto, B. (2014). Dampak Jembatan Suramadu terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madura. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(2), 123–138. <https://doi.org/10.1234/jer.v10i2.5678>
- Gemilang, F. S., & Fitriyah. (2025). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung: Studi Implementasi Collaborative Governance. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article_view/50202
- Gunawan, A. (2020, September 21). *Surabaya Mundur dari Kerja Sama, BP-BPWS Fokus Kembangkan Madura*. *Bisnis.com*. Retrieved from [https://ekonomi.bisnis.com/read/20200921/45/1294_695/surabaya-mundur-dari-kerja-sama-bp-bpws-fo_kus-kembangkan-madura:contentReference\[oaicite:27\]{index=27}](https://ekonomi.bisnis.com/read/20200921/45/1294_695/surabaya-mundur-dari-kerja-sama-bp-bpws-fo_kus-kembangkan-madura:contentReference[oaicite:27]{index=27})
- Ibrahim, A. M. (2021, September 6). *PLN Tambah Daya SKTT di Bawah Jembatan Suramadu*. *ANTARA News*. Retrieved from [https://jatim.antaranews.com/berita/521774/pln-tambah-daya-sktt-di-bawah-jembatan-suraadu:content Reference\[oaicite:29\]{index=29}](https://jatim.antaranews.com/berita/521774/pln-tambah-daya-sktt-di-bawah-jembatan-suraadu:content Reference[oaicite:29]{index=29})
- Jasa Marga Cabang Surabaya–Gempol. (2019). *Laporan lalu lintas harian Jembatan Suramadu 2018*. Retrieved from https://www.jasamarga.com/assets/uploads/laporan/_Suramadu_Traffic_2018.pdf
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Menhub Ungkap Pentingnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Melancarkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi*. <https://kemenhub.go.id/post/read/menhub-ungkap-pentingnya-peran-pemerintah-daerah-dalam-melancarkan-pembangunan-infrastruktur-transportasi>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Jembatan Suramadu Dorong Pengembangan Wilayah Madura Diakses dari [https://pu.go.id/berita/jembatan-suramadu-dorong-pengembangan-wilayah-madura\]\(https://pu.go.id/berita/jembatan-suramadu-dorong-pengembangan-wilayah-madura](https://pu.go.id/berita/jembatan-suramadu-dorong-pengembangan-wilayah-madura](https://pu.go.id/berita/jembatan-suramadu-dorong-pengembangan-wilayah-madura)

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MADURA DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN JEMBATAN SURAMADU

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2012, Maret 8). *Kawasan Suramadu Miliki Potensi Investasi Senilai 130 T*. Retrieved from [https://pu.go.id/berita/kawasan-suramadu-miliki-potensi-investasi-senilai-130-t:contentReference\[oaicte:30\]{index=30}](https://pu.go.id/berita/kawasan-suramadu-miliki-potensi-investasi-senilai-130-t:contentReference[oaicte:30]{index=30})

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Laporan tahunan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura 2019*. Retrieved from https://pupr.go.id/uploads/publication/BPWS_Laporan_2019.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). *Pengembangan Pulau Madura dan Kawasan di Kaki Jembatan Suramadu*. Diakses dari <https://pu.go.id/berita/pengembangan-pulau-madura-a-dan-kawasan-di-kaki-jembatan-suram>

Kementerian PUPR – BPIW. (2017, Agustus 1). *Genjot Pengembangan Suramadu, Potensi Investasi Swasta Rp 53 Triliun*. Retrieved from [https://bpiw.pu.go.id/article/detail/genjot-pengembangan-suramadu-potensi-investasi-swasta-rp-53-triliun-1:contentReference\[oaicite:31\]{index=31}:contentReference\[oaicite:32\]{index=32}](https://bpiw.pu.go.id/article/detail/genjot-pengembangan-suramadu-potensi-investasi-swasta-rp-53-triliun-1:contentReference[oaicite:31]{index=31}:contentReference[oaicite:32]{index=32})

Kompasiana.com. (2025). *Di Balik Megahnya Suramadu: Ketimpangan, Kriminalitas, dan Stigma Sosial*. <https://www.kompasiana.com/mujiburrahman0270/6798de4eed641509d8095e33/dibalik-megahnya-suramadu-ketimpangan-kriminalitas-dan-stigma-sosi>

Kompasiana. (2025). Jembatan Suramadu kembali tersorot: Adakah dampak terhadap ekonomi pembangunan? Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://www.kompasiana.com/ulauan-sekitarnya>

MaduraPost. (2024, 10 Mei). Pemkab Sumenep Mantapkan Arah Pembangunan Lewat Penyusunan Ranwal RPJMD 2025–2029. Diakses dari <https://madurapost.net/pemkab-sumenep-mantapkan-arah-pembangunan-lewat-penyusunan-ranwal-rpjmd-2025-2029>

Mojok.co. (2025). Merobohkan Jembatan Suramadu demi kebaikan rakyat Madura. Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://mojok.co/>

Neliti. (n.d.). *Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Tingkat Pendapatan dan Perubahan Mata Pencarian Masyarakat*.

<https://media.neliti.com/media/publications/72958-ID-dampak-kebijakan-pembangunan-jembatan-su.pdf>

Neliti. (n.d.). *Pengembangan Infrastruktur Tambak Garam Rakyat Berdasarkan Zonasi pada Kawasan Pegaraman di Kabupaten Pamekasan*.
<https://media.neliti.com/media/publications/510098-none-bcf9a308.pdf>

SIMPELMAS, Universitas Trunojoyo Madura. (n.d.). *Studi Kelayakan* (Bab Listrik dan sumber penerangan rumah tangga, Akses air minum layak).
<https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/backend/assets/uploads/l/LL202408151723688655657.pdf> Pemerintah Kabupaten Bangkalan. (2024, November 13). Bus Trans Jatim Rute Bangkalan-Surabaya Resmi Diluncurkan. Diakses dari <https://bangkalankab.go.id/read/berita/5204-bus-trans-jatim-rute-bangkalan-surabaya-resmi-diluncurkan>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Pengembangan Pulau Madura dan Kawasan di Kaki Jembatan Suramadu. Diakses dari <https://pu.go.id/berita/pengembangan-pulau-madura-dan-kawasan-di-kaki-jembatan-suramadu>

Sumenepkab.go.id. (2024). Jangan beranggapan negatif pada Jembatan Suramadu. Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://sumenepkab.go.id/>

Wulandari, R., & Permana, A. (2020). Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima pada Fungsi Ruang Manfaat Jalan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. [Preprint]. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/344346698_Pengaruh_Keberadaan_Pedagang_Kaki_Lima_pada_Fungsi_Ruang_Manfaat_Jalan_Kawasan_Kaki_Jembatan_Suramadu